

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerjaan merupakan suatu profesi yang ditekuni oleh seseorang dalam mencari nafkah atau biasa disebut sebagai mata pencaharian. *World Economic Forum* dalam penelitian (Adha et al., 2020) memprediksi 75 juta jenis pekerjaan akan mengalami pergantian dan 133 juta jenis pekerjaan yang baru akan muncul karena terdampak kemajuan teknologi. Asia tenggara merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam prediksi akan sangat terdampak dari adanya pergantian jenis pekerjaan. Seiring berkembangnya teknologi, wilayah asia tenggara diperkirakan akan berupaya untuk beralih profesi dari yang semula berfokus pada pekerjaan di bidang ketahanan pangan seperti pertanian termasuk nelayan, akan berangsur-angsur berfokus ke pekerjaan yang bersifat pelayanan. Hal ini mengakibatkan 6,6 juta jiwa penduduk kehilangan pekerjaan mereka karena tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang dibutuhkan (Adha et al., 2020). Untuk mengantisipasi lapangan pekerjaan didominasi oleh teknologi, pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri melalui berbagai program dan usaha-usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat.

Setiap masyarakat di Indonesia, memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi geografis di setiap daerahnya agar potensi yang dimiliki oleh negara ini dapat digunakan dengan maksimal. Berdasarkan letak geografisnya, pekerjaan yang berpotensi bagi masyarakat Indonesia berada pada sektor kelautan dan perikanan karena wilayah negara ini didominasi dengan lautan

seluas 70% dan memiliki hasil laut melimpah meliputi ikan, lobster, teripang, rumput laut dan lain sebagainya. Nelayan menurut Kusnadi (2007) dalam (Mussadun & Nurpratiwi, 2016) adalah kelompok yang bergantung pada kondisi laut. Pada dasarnya nelayan tergolong menjadi bagian dari masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah sekelompok orang yang bermukim pada suatu wilayah pesisir dan sumber kehidupan serta perekonomiannya sangat bergantung pada pemanfaatan sumberdaya laut (Abidin, 2019).

Banyaknya hasil laut di laut Indonesia tentu dapat menjadi sumber penyokong perekonomian negara. Maka, pendapatan para nelayan seharusnya dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya, berdasarkan penelitian menurut Anwar et al (2019) kurang dari 14,58 juta orang yang setara dengan 90% dari 16,2 juta jumlah keseluruhan nelayan di Indonesia masih belum berdaya baik secara ekonomi dan politik karena tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi ini yang mendasari persepsi bahwa penduduk yang bertempat tinggal di kawasan pesisir adalah masyarakat dengan kehidupan yang serba kekurangan. Sehingga tidak mengherankan apabila di banyaknya kota metropolitan, salah satu pekerjaan yang paling banyak ditinggalkan adalah nelayan karena tidak ada peningkatan pendapatan dan hasilnya tidak menentu (Hardianto, 2016).

Kewajiban pemerintah saat ini yaitu menjalin hubungan yang bersifat fungsional dengan nelayan dan dilakukan secara intensif sehingga adanya program maupun kebijakan-kebijakan dalam pembangunan memperoleh partisipasi dari para nelayan (Hasriyanti & Hendra, 2021). Oleh sebab itu, diperlukan strategi agar

para nelayan di Indonesia tidak memilih untuk beralih profesi. Sebab apabila nelayan tidak dapat berkembang, maka angka kemiskinan di Indonesia tidak dapat ditekan (Anwar et al., 2019). Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat pesisir pada umumnya berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian lain diluar menangkap ikan dan memanen hasil laut lainnya. Adanya ketergantungan pada sumber daya laut juga dapat menimbulkan kepasrahan, akibatnya tidak ada peningkatan kemampuan maupun pengetahuan pada masyarakat pesisir untuk melakukan inovasi terhadap hasil panen laut.

Suatu strategi yang dapat digunakan adalah dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat pesisir yang kurang pemahaman mengenai pemanfaatan dan pengelolaan hasil laut. Alhasil hingga saat ini masih banyak ditemukan ikan busuk yang tidak terjual dan juga bagian ikan seperti kepala dan juga duri ikan yang menjadi tumpukan sampah di sekitar wilayah pantai dan Sentra Ikan Bulak (SIB) yang seharusnya menjadi pusat pengolahan dan jual beli hasil laut. Hal ini disebabkan oleh sepiunya pengunjung di berbagai tempat wisata yang ada di Kecamatan Bulak, sehingga para pedagang mengalami kerugian (Sari, 2017).

Gambar 1. 1 Sentra Ikan Bulak Sepi Pengunjung



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Sepinya pengunjung di SIB ini disebabkan oleh pedagang yang memilih berjualan di sekitar pantai hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas, pantai menjadi kumuh dan mengganggu estetika wilayah. Oleh sebab itu diperlukan pemberdayaan dalam pengelolaan hasil laut khususnya pada pelaku usaha sebagai alternatif untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

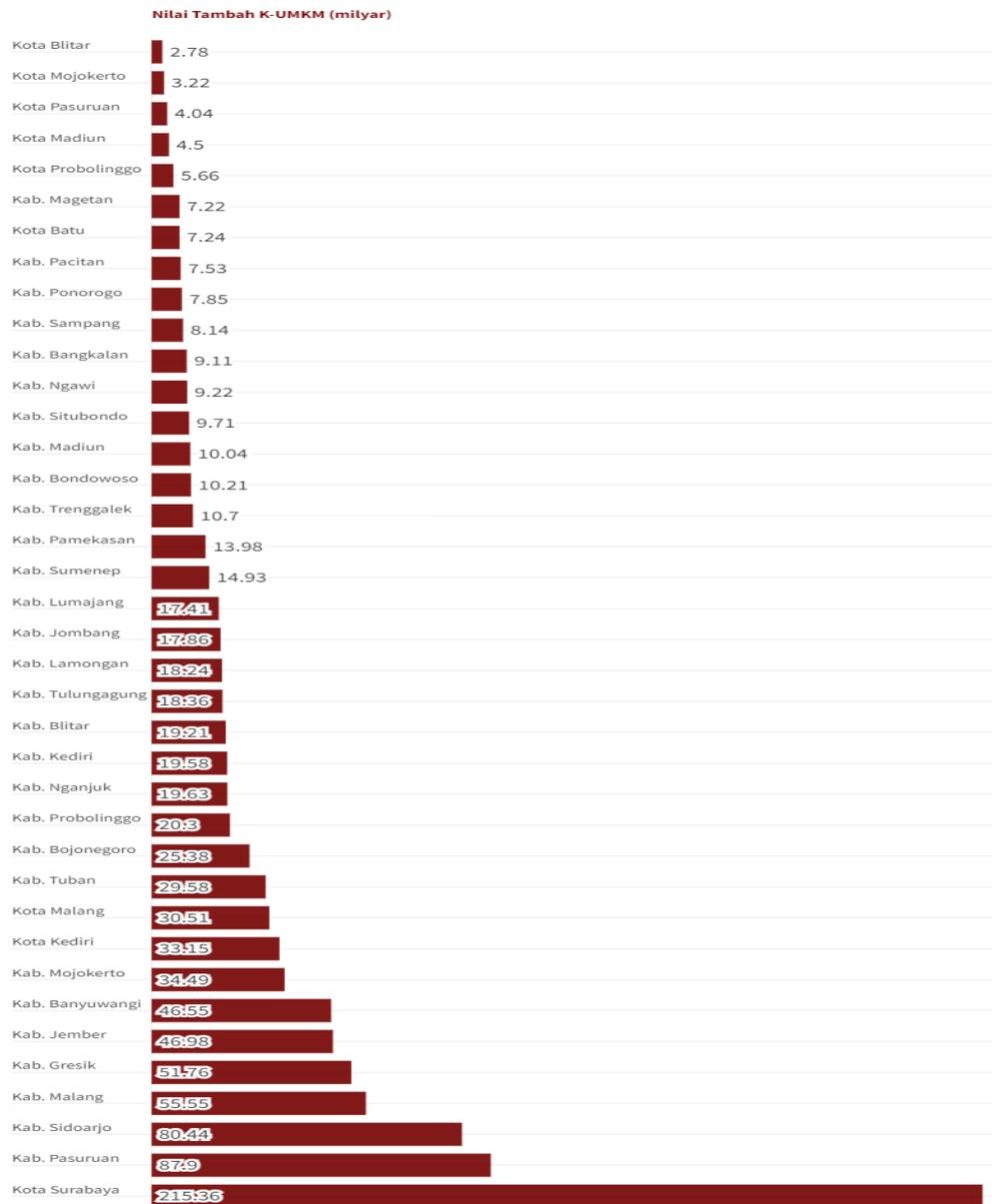
Pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, seperti penyaluran keterampilan, pemberian, pengembangan dan penguatan pengetahuan serta kemampuan terhadap apa yang telah diberikan serta untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berdaya dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang menjadi penghambat dalam kehidupan masyarakat (Aristianto, 2018). Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat mampu menggali sumber-sumber produktif untuk meningkatkan pendapatan, membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan dengan memaksimalkan partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan khususnya dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Sudaryanto & Wijayanti, 2014).

Adanya pemberdayaan terhadap UMKM di wilayah pesisir akan meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga masyarakat mampu menghidupi diri dari hasil laut dengan mengolah hasil laut secara maksimal menjadi produk-produk yang dapat dipasarkan secara luas (Wurlina et al., 2022). Pengertian UMKM menurut Hanim (2018) UMKM merupakan bagian dari usaha yang berdiri sendiri dan dijalankan secara aktif sehingga dapat menguntungkan, UMKM dapat dikelola secara pribadi maupun melalui badan usaha dalam bidang perekonomian dan termasuk dalam sektor yang potensial dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 bahwa UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut.

Seiring dengan perkembangan UMKM di berbagai wilayah di Indonesia, pada tahun 2022 Provinsi Jawa Timur mencatat kontribusi UMKM terhadap perekonomian di daerahnya berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Infografis Nilai Tambah Bruto K-UMKM Tahun 2022



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2022

Berdasarkan gambar di atas, yang memberikan kontribusi paling tinggi pada Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya dengan perolehan 215,364 miliar. Selanjutnya, Pasuruan berada pada tingkat kedua dengan memperoleh 87,901 miliar. Disusul Kabupaten Sidoarjo dengan perolehan 80,442 miliar. Kemudian, ada Kabupaten Malang dengan kontribusi sebesar 55,552 miliar. Tingginya jumlah

kontribusi UMKM yang diberikan oleh Kota Surabaya terhadap perekonomian Jawa Timur, tentunya tidak luput dari campur tangan dan peran dari Pemerintah Kota Surabaya.

Keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam mendorong kemajuan UMKM agar lebih optimal dapat dilihat dari adanya berbagai program, kebijakan, dan fasilitas untuk membantu pengembangan UMKM (Virdani & Widiyarta, 2022). Bukti nyata dari upaya Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar pertama dialokasikan untuk pengembangan UMKM seperti pemberdayaan dan pengawasan UMKM. Dalam hal ini Walikota Surabaya menegaskan pengoptimalan UMKM dalam wilayah Kota Surabaya sebagaimana terdapat pada pemberitaan yang dimuat News.republika.co.id (2023):

“Ini saatnya kita bangkit bersama karena APBD Kota Surabaya Tahun 2023 sebesar Rp11,2 triliun (Rp11.257.640.114.475). Nanti Insya Allah 40 persennya akan dikerjakan oleh UMKM (usaha mikro kecil menengah) Surabaya. Jadi, kita sama-sama ingin mengentas kemiskinan dan selalu saya katakan bahwa pemerintah daerah itu bukan pemerintah kota sendiri, tapi pemerintah daerah itu adalah kekuatan besar antara pemerintah kota dengan DPRD-nya. Insya Allah kalau kita bergerak bersama, pengangguran dan kemiskinan bisa diselesaikan bersama.” (<https://news.republika.co.id/berita/r151sy380/wali-kota-40-persen-apbd-surabaya-2023-diprioritaskan-untuk-umkm>, diakses pada Senin, 11 September 2023)

Berdasarkan berita di atas, Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan APBD untuk pelaku UMKM dan berusaha mendorong ekonomi rakyat sebagai upaya memberdayakan UMKM dan masyarakat dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Surabaya. Maka dari itu, pelaku usaha

diharapkan dapat mengoptimalkan kesempatan tersebut untuk perkembangan produk usahanya.

Kecamatan Bulak adalah suatu kecamatan yang terletak di pinggiran Kota Surabaya. Total jumlah UMKM di Kecamatan ini yaitu sekitar 2039 UMKM yang terdiri dari berbagai macam jenis usaha seperti toko kelontong, warung kopi, jasa *laundry*, usaha *furniture*, kuliner, usaha elektronik, usaha di bidang *fashion*, dan lain sebagainya. Namun, usaha yang memiliki potensi dan menjanjikan bagi masyarakat daerah ini merupakan usaha di bidang perikanan dan kelautan. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bulak memiliki jumlah nelayan terbanyak dibandingkan dengan sembilan kecamatan dengan potensi tepi laut di Kota Surabaya. Oleh sebab itu, Kecamatan Bulak menjadi kawasan pesisir yang menonjol di Kota Surabaya (Viola & Arif, 2022). Adapun berikut jumlah nelayan yang tersebar di Kota Surabaya dilihat berdasarkan letak kecamatannya:

Tabel 1. 1 Jumlah Nelayan di Kota Surabaya Lima Tahun Terakhir

No.	Kecamatan	Jumlah Nelayan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Gunung Anyar	10	12	10	12	12
2.	Rungkut	54	50	61	63	63
3.	Sukolilo	24	46	40	34	47
4.	Mulyorejo	210	133	133	147	147
5.	Bulak	822	756	691	660	660
6.	Kenjeran	246	233	243	228	228
7.	Krembangan	93	114	121	114	114
8.	Asemrowo	397	418	367	338	338
9.	Benowo	189	191	230	227	227
Jumlah Nelayan di Kota Surabaya		2.045	1.953	1.896	1.823	1.823

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2023

Berdasarkan data dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah nelayan di Kota Surabaya pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami penurunan dan pada tahun

2023 jumlah nelayan tetap, tidak mengalami penurunan maupun kenaikan. Hal ini dapat terjadi karena nelayan termasuk dalam profesi yang sepenuhnya bergantung pada kondisi laut dan isinya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian ekonomi pada nelayan, sehingga akan berdampak pada jumlah upah yang didapatkan oleh para nelayan. Bahkan menurut penelitian dari Adam (2018) dalam (Chandriyanti & Fahrati, 2020), nominal upah harian yang didapatkan oleh seorang nelayan atau buruh tani dinyatakan lebih rendah apabila dibandingkan dengan nominal upah harian seorang kuli bangunan. Oleh karena itu, sulit untuk mewujudkan kemandirian dan kemakmuran bagi masyarakat di daerah pesisir. Sedangkan jika dilihat dari tabel di atas, jumlah nelayan terbanyak di Kota Surabaya setiap tahunnya berada di Kecamatan Bulak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di daerah ini untuk memaksimalkan hasil olahan laut guna meningkatkan kemandirian dan menunjang ekonomi masyarakat setempat.

Memiliki wilayah yang dominan akan laut, Kecamatan Bulak ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Jawa Timur sebagai kawasan penangkapan ikan tradisional, dan ditunjuk sebagai kawasan dengan sektor basis dan sektor utama berupa kegiatan perikanan dalam RTRW Kota Surabaya 2014-2034. Wilayah ini juga memiliki potensi bencana abrasi dan banjir yang cukup rendah, sehingga sangat memadai jika digunakan sebagai kawasan pengembangan (Aninditya & Rahmawati, 2017). Ketersediaan sumber daya perikanan dan kelautan ini dimanfaatkan oleh sebagian penduduk Kecamatan Bulak untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti kegiatan penangkapan, pengolahan, dan

penjualan hasil laut. Apabila dimanfaatkan secara terencana dan optimal, sektor perikanan dan kelautan di Kecamatan Bulak akan menjadi sektor unggulan dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Kota Surabaya di masa mendatang.

Para pelaku UMKM pengrajin olahan hasil laut melihat adanya peluang untuk mengembangkan usaha di Kecamatan Bulak dengan dibangunnya Sentra Ikan Bulak sebagai pusat produk olahan laut. Maka kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kewirausahaan oleh pelaku UMKM ini menjadi peluang bagi masyarakat pesisir. Sehingga tidak mengherankan apabila keberadaan UMKM pengrajin olahan hasil laut di Kecamatan Bulak sangat mudah dijumpai, baik usaha yang dijalankan secara individu maupun berkelompok. Berikut data UMKM pengrajin olahan hasil laut di Kecamatan Bulak berdasarkan data dari Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian di Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM Pengrajin Olahan Hasil Laut di Kecamatan Bulak

No.	Nama Kelurahan	Jumlah UMKM Olahan Hasil Laut
1.	Kelurahan Bulak	83
2.	Kelurahan Kenjeran	55
3.	Kelurahan Kedung Cowek	96
4.	Kelurahan Sukolilo Baru	57
Total		291 UMKM

Sumber: data dikelola penulis, 2023

Dari tabel 1.2 di atas diketahui bahwa Kecamatan Bulak memiliki jumlah UMKM pengrajin olahan hasil laut yang cukup banyak, terutama pada Kelurahan Kedung Cowek dengan jumlah pengrajin olahan hasil laut terbanyak yaitu 96 UMKM, Kelurahan Bulak sebanyak 83 UMKM, disusul dengan Kelurahan Sukolilo Baru sebanyak 57 UMKM, dan Kelurahan Kenjeran sebanyak 55 UMKM olahan hasil laut. UMKM pengrajin olahan hasil laut yang tersebar di Kecamatan

Bulak ini terbagi kedalam beberapa jenis, mulai dari kuliner yaitu olahan ikan *frozen*, kerupuk teripang, kerupuk terung, kerupuk udang dan sambal jeroan ikan, kerajinan seperti kalung dari kerang, gelang, bingkai cermin dan bingkai foto. Oleh sebab itu, agar UMKM pengrajin olahan hasil laut di Kecamatan Bulak dapat terus berkembang diperlukan adanya pemberdayaan yang berkala serta berkelanjutan dari Pemerintah Kota Surabaya maupun pihak Kecamatan Bulak. Hal ini didukung oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, bahwa Walikota melalui Camat dan perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pemberdayaan UMKM berwenang dalam melakukan pembinaan dan mengawasi pemberdayaan UMKM di daerah secara rutin dan berkesinambungan.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan serta kompetensi untuk bersaing terhadap para pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan usaha yang sehat namun tetap berjalan ketat dan kompetitif. Pemberdayaan juga dilakukan untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian usaha bagi setiap pelaku UMKM dalam rangkaian kegiatan ekonomi yang berpedoman pada prinsip kemasyarakatan di daerah. Sebagai salah satu ikon pariwisata di Kota Surabaya dalam sektor perikanan dan kelautan (Ananda, 2018), peran pelaku UMKM olahan hasil laut di Kecamatan Bulak harus diimbangi dengan perencanaan yang matang guna membangkitkan sumber-sumber potensial yang dimiliki UMKM.

Kontribusi hasil laut pada kesejahteraan para nelayan dan masyarakat di Kecamatan Bulak cukup besar dibuktikan dengan adanya UMKM olahan ikan dan kerang di Kecamatan Bulak yang diprakasai UMKM “BUNDA” dan para istri nelayan yang bergabung dalam UMKM “Nelayan Q” dengan melakukan inovasi olahan hasil laut untuk meningkatkan nilai jual dan menambah penghasilan keluarga (Wurlina et al., 2022). Hal ini sebagaimana terdapat dalam pemberitaan yang termuat dalam [Harian.disway.id](https://harian.disway.id) (2023):

“Sejatinya kawasan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. untuk dijadikan sektor pariwisata. sinergi pemerintah dan warga sangat dibutuhkan untuk saat ini. Daerah bulak ini memang sangat terkenal dengan olahan ikan asapnya, ikan asap merupakan produk yang di kelola oleh kelompok UMKM warga sekitar. dengan berkembangnya sektor wisata tersebut, secara tidak langsung akan memajukan pendapatan UMKM. Analogi ini cocok untuk menggambarkan program kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Dengan berkembangnya pariwisata ada banyak pihak yang merasakan dampak kenaikan perekonomian, membangun ekonomi mandiri untuk nelayan dan masyarakat sekitar.” (<https://harian.disway.id/read/686619/membuka-gerbang-pariwisata-dan-ekonomi-mandiri-melalui-kabayan-bulak>, diakses pada Minggu, 29 Oktober 2023)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa adanya pengembangan potensi UMKM pengrajin olahan hasil laut akan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat di Kecamatan Bulak. Kemudian untuk meningkatkan kualitas UMKM diperlukan adanya koordinasi dari Pemerintah Kota Surabaya, Kecamatan Bulak, dan masyarakat. Sebab upaya untuk memberdayakan UMKM adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen, bukan hanya keputusan dalam jangka pendek. Untuk itu dalam pemberdayaan dibutuhkan suatu rencana strategis yang berkelanjutan. Program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dalam upaya

pemberdayaan yaitu dengan memfasilitasi dan mengadakan pelatihan UMKM yang dilaksanakan secara berkala yaitu minimal empat kali dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab untuk memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha yang dimiliki.

Menurut Mardikanto Soebiato bahwa dalam upaya memberdayakan UMKM dibutuhkan suatu strategi sebagai pendekatan (Mardikanto, et al., 2021). Adapun strategi sebagai pendekatan pemberdayaan meliputi strategi sebagai suatu rencana, sebagai kegiatan, sebagai suatu instrumen, dan sebagai pola pikir. Dalam memberdayakan UMKM pengrajin olahan hasil laut di Kecamatan Bulak memiliki beberapa tahapan yang mana sesuai dengan strategi pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan Mardikanto Soebiato. Melihat adanya hambatan dan peluang yang ada pada pelaku UMKM pengrajin olahan hasil laut di Kecamatan Bulak dan bagaimana upaya untuk memberdayakan UMKM yang ada maka penulis memfokuskan penelitian mengenai pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengrajin Olahan Hasil Laut di Kecamatan Bulak. Oleh sebab itu, penulis berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Pengrajin Olahan Hasil Laut di Kecamatan Bulak Kota Surabaya.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan peneliti pada latar belakang, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pengrajin Olahan Hasil Laut di Kecamatan Bulak Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pengrajin Olahan Hasil Laut di Kecamatan Bulak Kota Surabaya agar menjadi lebih berdaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi ilmu yang menambah wawasan dan pengetahuan dalam pemerintahan daerah, khususnya dalam lingkup administrasi publik sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang secara teoritis diperoleh pada studi di bangku perkuliahan, serta dapat menjadi bahan pemikiran dan acuan bagi penelitian selanjutnya terutama dalam mengetahui tentang strategi atau upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pengrajin Olahan Hasil Laut di Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Untuk Peneliti

Sebagai suatu ilmu baru yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti terkait upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM dengan menggunakan teori yang pemahaman peneliti yang didapatkan dalam bangku perkuliahan, agar nantinya hasil tulisan ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

b. Untuk Universitas/Perguruan Tinggi

Sebagai penyumbang data dan informasi yang dapat menunjang pemikiran dan menjadi perbandingan akademik yang berguna bagi mahasiswa, khususnya bagi yang melaksanakan penelitian serupa di masa mendatang.

c. Untuk Instansi/Dinas/Organisasi/Pihak Lainnya

Diharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi penambah informasi dan masukan terutama bagi instansi yang terkait seperti Kecamatan Bulak, Pelaku UMKM Pengrajin Olahan Hasil Laut di Kecamatan Bulak, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya untuk proses pembangunan.